

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat di suatu negara. Salah satu fokus utamanya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan Sumber Daya Manusia dan menciptakan lapangan kerja yang luas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya, sering muncul tantangan di mana ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada, sehingga memicu masalah pengangguran. Menurut *International Labour Organization* (ILO), tingkat pengangguran menunjukkan sejauh mana tenaga kerja yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal, yang mencerminkan ketidakmampuan suatu ekonomi dalam menyediakan pekerjaan.² Dengan kata lain, tingkat pengangguran merupakan salah satu yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi.

Sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, Indonesia memiliki potensi pasar yang luas, terutama dari segi penyediaan tenaga kerja. Populasi yang besar dapat mendorong pasar dari sisi permintaan melalui efek pengganda, karena tingginya permintaan agregat. Selain itu, sebagai sumber

² Sherty Veronika, & Ade Yunita Mafruhah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis (JRIEB)*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 140

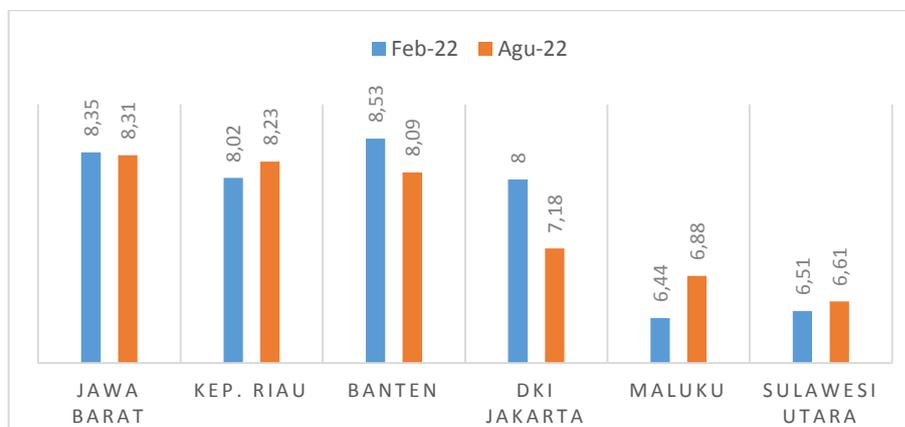
tenaga kerja, penduduk yang banyak berperan dalam mendorong perekonomian dari sisi penawaran. Namun, jika pertumbuhan penduduk tidak diiringi dengan peningkatan lapangan kerja, masalah ketenagakerjaan seperti meningkatnya angka pengangguran bisa muncul, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kemiskinan, kriminalitas, dan masalah sosial-ekonomi lainnya di masyarakat.³

Menurut teori Keynes, pengangguran dalam masyarakat disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat terhadap barang dan jasa, yang diiringi dengan ketidakfleksibelan upah di pasar tenaga kerja. Artinya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa menurun, yang menyebabkan penurunan produksi oleh perusahaan. Akibatnya, banyak tenaga kerja tidak digunakan, sehingga terjadi pengangguran. Secara teoritis, penurunan produksi seharusnya diikuti oleh penurunan upah, namun karena upah tidak fleksibel, pengangguran justru meningkat. Inilah yang disebut sebagai pengangguran akibat kurangnya permintaan agregat.⁴ Untuk memberikan gambaran nyata terkait tingkat pengangguran di Indonesia, kita dapat melihat data tingkat pengangguran terbuka di beberapa provinsi.

³ Dwi Mahrojidan, & Iin Nurkhasanah, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten", *Jurnal Ekonom-Qu*, Vol. 9, No. 1, 2019, hlm. 52

⁴ Indra Suhendra, & Bayu Hadi Wicaksono, "Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia", *Jurnal Ekonom-Qu*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 3-4

Gambar 1.1 Enam Provinsi Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi (persen) di Indonesia pada Februari dan Agustus 2022



Sumber: bps.go.id

Gambar tersebut menunjukkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di enam provinsi di Indonesia pada Februari dan Agustus 2022 berdasarkan Badan Pusat Statistik. Jawa Barat menjadi provinsi dengan TPT tertinggi pada kedua periode, dengan angka 8,35% di Februari dan sedikit turun menjadi 8,31% di Agustus. Kepulauan Riau menempati posisi kedua, dengan peningkatan kecil dari 8,02% menjadi 8,23%. Banten menunjukkan penurunan dari 8,53% menjadi 8,09. DKI Jakarta mengalami penurunan signifikan dari 8% di Februari menjadi 7,18% di Agustus. Maluku mencatat kenaikan dari 6,44% menjadi 6,88%. Sulawesi Utara juga mencatat kenaikan kecil dari 6,51% menjadi 6,61%.⁵ Dari ke enam provinsi tersebut, Jawa Barat secara konsisten menjadi provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia pada tahun 2022. Meskipun terdapat sedikit penurunan dari Februari ke Agustus, angka TPT tetap berada di

⁵ Badan Pusat Statistik, *Tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi*. Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html> diakses pada tanggal 23 November 2024

urutan pertama dan menunjukkan tantangan besar yang dihadapi provinsi ini dalam mengatasi pengangguran.

Tabel 1.1 Tujuh Provinsi Tingkat Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB terbesar di Indonesia 2019-2022

No.	Provinsi	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB			
		2019	2020	2021	2022
1.	Jawa Barat	42,98	42,16	42,36	42,98
2.	Kep. Riau	37,98	40,77	41,96	41,74
3.	Jawa Tengah	34,14	33,73	33,41	32,96
4.	Banten	33,89	33,44	33,63	33,18
5.	Riau	30,9	31,85	32,07	32,13
6.	Papua Barat	30,36	31,16	30,6	30,87
7.	Jawa Timur	30,23	30,31	30,26	30,52

Sumber: bps.go.id

Disisi lain, berdasarkan tabel tersebut, Jawa Barat juga tercatat sebagai penyumbang terbesar proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB nasional sejak 2019 hingga 2022.⁶ Seharusnya, sektor industri manufaktur ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Mengingat, keunggulan utama sektor ini terletak pada karakteristik produknya yang bersifat *tradable* atau dapat diperdagangkan. Kemampuan untuk diperdagangkan ini memungkinkan terciptanya rantai nilai yang menghubungkan produsen dengan konsumen akhir. Implikasinya ialah peningkatan peluang kerja dan efek ekonomi yang signifikan dari sektor manufaktur. Selain itu, dengan banyaknya industri manufaktur yang bersifat padat karya bisa menjadi sangat penting untuk mendorong terciptanya lebih

⁶ Badan Pusat Statistik, *Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIxNCMy/proporsi-nilai-tambah-sektor-industri-manufaktur-terhadap-pdb.html> diakses pada tanggal 23 November 2024.

banyak lapangan pekerjaan.⁷ Oleh karena itu, fenomena ini menarik dan relevan untuk diteliti lebih lanjut guna memahami faktor-faktor yang menyebabkan tingginya TPT di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Menurut teori kependudukan yang dikemukakan oleh Malthus, jumlah penduduk bisa mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Dalam teorinya, Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung meningkat lebih cepat daripada ketersediaan sumber daya alam dan lapangan kerja. Ketika jumlah penduduk meningkat, terjadi peningkatan pasokan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja terdidik. Namun, peningkatan ini tidak selalu diikuti oleh permintaan tenaga kerja yang memadai. Ketidakseimbangan ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja menjadi kurang optimal, sehingga menimbulkan pengangguran, termasuk di kalangan tenaga kerja yang telah terdidik.⁸

Tabel 1.2 Lima Jumlah Penduduk Terbesar Menurut Provinsi di Indonesia

No.	Provinsi di Indonesia	Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribuan Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jawa Barat	48475,5	49023,2	50345,2	48274,2	48738,8
2.	Jawa Timur	39521,9	39744,8	41814,5	40665,7	40921,1
3.	Jawa Tengah	34358,5	34552,5	37892,3	36516	36811,1
4.	Sumatera Utara	14476	14639,4	15588,5	14799,4	14970,5
5.	Banten	12530,8	12714,3	12431,4	11904,6	12023

Sumber: sulut.bps.go.id

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk di beberapa provinsi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 (dalam ribuan jiwa). Provinsi Jawa Barat

⁷ Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, "Kondisi Industri Manufaktur Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 1

⁸ Fatma Shafira Nurul Ramadhani, "Pengaruh Kondisi Demografi, Ketenagakerjaan, dan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, 2021.

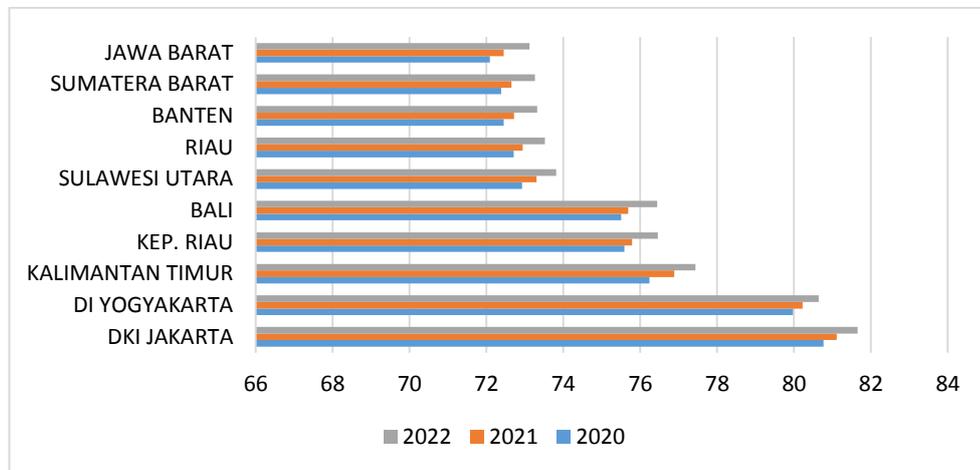
secara konsisten memiliki jumlah penduduk tertinggi setiap tahun dibandingkan provinsi lainnya, mencapai 48.738,8 ribu jiwa pada tahun 2022. Jawa Timur dan Jawa Tengah berada di posisi berikutnya sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar setelah Jawa Barat.⁹ Jika data ini dikaitkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), terlihat adanya korelasi antara jumlah penduduk dan tingkat pengangguran di Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan teori Malthus, bahwa jumlah penduduk yang besar berpotensi meningkatkan pengangguran, terutama ketika pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk.

Tingkat pengangguran terbuka juga dapat dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Todaro, *human capital* memiliki peran fundamental bagi pembangunan perekonomian suatu wilayah. Teori ini menjelaskan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai faktor utama penentu seberapa baik kualitas modal manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesehatan suatu populasi, semakin baik kualitas tenaga kerjanya, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan menurunkan angka pengangguran.¹⁰

⁹ Badan Pusat Statistik. *Jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia*. <https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTU4IzI=/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-diindonesia.html> diakses pada tanggal 24 November 2024.

¹⁰ Dwi Wilujeng & Ferry Prasetyia, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran", *Journal of Development Economic and Social Studies*, Vol. 3 No. 2, 2024, hlm. 419.

Gambar 1.2 Sepuluh Besar Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia



Sumber: bps.go.id

Grafik diatas menampilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sepuluh provinsi terbesar di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022. Jawa Barat mencatat peningkatan IPM dari 72,09 pada tahun 2020 menjadi 73,12 pada tahun 2022. Meski mengalami peningkatan, angka ini menempati urutan ke sepuluh provinsi terbesar IPM di Indonesia dan berada di bawah beberapa provinsi lain seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur yang memiliki IPM lebih tinggi.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat masih relatif lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi tersebut. Ketika dibandingkan dengan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Jawa Barat memiliki TPT tertinggi secara nasional, yaitu 8,35% pada Februari dan sedikit menurun menjadi 8,31% pada Agustus. Hal ini kontras dengan provinsi seperti DKI Jakarta, yang memiliki IPM tertinggi

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2019-2021*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk0IzI=/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html> diakses pada tanggal 24 November 2024.

(81,65 pada tahun 2022) dan TPT yang menurun signifikan dari 8% pada Februari menjadi 7,18% pada Agustus. Jadi, meskipun IPM meningkat, TPT di Jawa Barat tetap yang tertinggi secara nasional.

Menurut teori Neoklasik, tingkat upah minimum bisa mempengaruhi tingkat pengangguran. Menurutnya, ketika tingkat upah naik, penawaran tenaga kerja cenderung meningkat. Sebaliknya permintaan terhadap tenaga kerja akan berkurang bila tingkat upah meningkat. Ketika upah mencapai titik ekuilibrium penawaran dan permintaan tenaga kerja maka tercapai keseimbangan pasar tenaga kerja.¹² Jadi, jika upah minimum berada di atas tingkat ekuilibrium, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja, di mana jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, hubungan antara upah minimum dan tingkat pengangguran menjadi krusial untuk dipahami dalam konteks perekonomian daerah, terutama di Jawa Barat.

Tabel 1.3 Tingkat Upah Minimum Terendah di Indonesia Menurut Provinsi

No.	Provinsi	2020	2021	2022
1.	Jawa Tengah	1.742.015,22	1.798.979,12	1.812.935,43
2.	DI. Yogyakarta	1.704.608,25	1.765.000,00	1.840.915,53
3.	Jawa Barat	1.810.351,36	1.810.351,36	1.841.487,31
4.	Jawa Timur	1.768.777,08	1.868.777,08	1.891.567,12
5.	Nusa Tenggara Timur	1.950.000,00	1.950.000,00	1.975.000,00

Sumber: satudata.kemnaker.go.id

¹² Silvia Luthfiyah Ghinastri & Wildan Syafitri, "Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Kemiskinan", *Journal of Development Economic and Social Studies*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 76.

Berdasarkan data tersebut, upah minimum di Jawa Barat mengalami peningkatan dari Rp1.742.015,22 pada 2020 menjadi Rp1.841.487,31 pada 2022, mencerminkan kebijakan kenaikan upah minimum yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja.¹³ Peningkatan upah minimum berturut-turut pada tahun 2020-2022 dan tingginya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 menunjukkan adanya kemungkinan ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja, sesuai dengan teori Neoklasik, di mana peningkatan upah minimum yang melebihi tingkat ekuilibrium dapat mengurangi permintaan tenaga kerja, sementara penawaran tenaga kerja meningkat. Korelasi ini menegaskan pentingnya analisis komprehensif terhadap kebijakan upah minimum dalam kaitannya dengan dinamika pengangguran di Jawa Barat.

Faktor keempat, pengelolaan zakat yang dilakukan secara terencana dan terorganisir dapat memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan nasional.¹⁴ Menurut pandangan Al-Arif, efek pengganda Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terhadap pengangguran dapat dijelaskan dengan cara bahwa pembayaran zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga meningkatkan daya beli mereka. Peningkatan daya beli ini akan mendorong permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya memaksa perusahaan untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan tersebut. Kenaikan produksi ini akan memerlukan

¹³ Kementerian TenagaKerja, *Satudata Kemnaker*, https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/03/files/data/1647330092412_UMP%25202018%2520s.d%25202022.xlsx diakses pada tanggal 1 Desember 2024.

¹⁴ Tunjung Pramesti Zahra, & Ilmiawan Auwalin, "The Influence of Zakat Infak Sedekah (ZIS) on Unemployment in Indonesia: Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Method", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7 No. 2, 2020, hlm. 374.

tambahan tenaga kerja, sehingga perusahaan akan mencari dan merekrut lebih banyak pekerja.¹⁵

Data penyaluran dana ZIS di Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, total penyaluran dana ZIS mencapai Rp. 583.831.672.676,¹⁶ sementara pada tahun 2022 melonjak drastis menjadi Rp. 3.104.210.811.387.¹⁷ Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap penguatan peran zakat dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Namun, meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam penyaluran ZIS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat masih berada pada angka yang tinggi pada tahun 2022. Fakta ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai seberapa besar kontribusi nyata ZIS dalam menurunkan tingkat pengangguran di daerah ini, serta sejauh mana efektivitas distribusi dan pemanfaatan dana ZIS telah menyentuh sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Mengacu pada persoalan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian asosiatif dan pendekatan penelitian kuantitatif dengan judul "Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Upah Minimum, dan Jumlah Zakat Infak Sedekah (ZIS) terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat".

¹⁵ *ibid.* Hlm. 377.

¹⁶ BAZNAS Jabar, *Annual Report 2021*, (Bandung: BAZNAS Provinsi Jawa Barat, 2022), hal. 21 <https://www.baznasjabar.org/content/laporan-pengelolaan-zakat> dikases pada 25 Mei 2025.

¹⁷ BAZNAS Jabar, *Annual Report 2022*, (Bandung: BAZNAS Provinsi Jawa Barat, 2023), hal. 25 <https://www.baznasjabar.org/content/laporan-pengelolaan-zakat> dikases pada 25 Mei 2025.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di wilayah tersebut, sehingga dapat membantu dalam merumuskan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah pengangguran.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jawa Barat secara konsisten memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia pada tahun 2022. Meskipun mengalami sedikit penurunan dari 8,35% (Februari) menjadi 8,31% (Agustus), angka ini tetap tinggi dibandingkan provinsi lain. Hal ini menandakan adanya permasalahan struktural dalam penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.
2. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mencapai 48,73 juta jiwa pada tahun 2022. Berdasarkan teori Malthus, pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diiringi peningkatan kesempatan kerja dapat meningkatkan angka pengangguran.
3. IPM Jawa Barat meningkat dari 72,09 (2020) menjadi 73,12 (2022), angka ini masih relatif rendah dibandingkan provinsi lain seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia belum cukup efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran.
4. Upah minimum di Jawa Barat mengalami peningkatan dari Rp1.810.351,36 (2021) menjadi Rp1.841.487,31 (2022). Namun, teori Neoklasik

menyebutkan bahwa kenaikan upah dapat menyebabkan ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja, di mana permintaan tenaga kerja berkurang sementara penawaran tenaga kerja meningkat, sehingga berpotensi memperburuk pengangguran.

5. Total penyaluran dana ZIS se-Jawa Barat mengalami peningkatan dari Rp. 583.831.672.676 pada tahun 2021 ke Rp. 3.104.210.811.387 pada tahun 2022. Menurut teori efek pengganda dalam ekonomi Islam, zakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Namun, tingginya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 menimbulkan pertanyaan seberapa efektif ZIS dapat menjadi faktor yang dapat mengurangi masalah TPT.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dibentuk rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Upah Minimum, dan jumlah Zakat Infak Sedekah (ZIS) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat 2021-2022?
2. Apakah jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat 2021-2022?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat 2021-2022?

4. Apakah Tingkat Upah Minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Bara 2021-2022?
5. Apakah Zakat Infak Sedekah (ZIS) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat 2021-2022?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh antara jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Upah Minimum, dan jumlah Zakat Infak Sedekah (ZIS) secara simultan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat 2021-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat 2021-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat 2021-2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Upah Minimum terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat 2021-2022.
5. Untuk menganalisis pengaruh jumlah Zakat Infak Sedekah (ZIS) terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat 2021-2022.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari dua kategori yaitu pertama untuk kepentingan ilmiah dan kedua untuk kepentingan praktis Keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis/Ilmiah

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur ilmiah, khususnya dalam bidang ekonomi makro dan ekonomi Islam terkait pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat upah minimum, dan jumlah Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) terhadap tingkat pengangguran terbuka..

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Selaku Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait penekanan jumlah penduduk, peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia, pengaturan upah minimum, serta pengelolaan ZIS dalam rangka menekan tingkat pengangguran terbuka. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk mengatasi masalah pengangguran.

- b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian-penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas. Peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi variabel lain yang berpotensi mempengaruhi pengangguran, atau menerapkan pendekatan yang berbeda untuk memperdalam analisis mengenai hubungan faktor-faktor ekonomi dan sosial terhadap tingkat pengangguran di berbagai daerah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas, sehingga penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada periode 2021-2022. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Variabel Bebas:

- 1) Jumlah Penduduk (X1)
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X2)
- 3) Tingkat Upah Minimum (X3)
- 4) Jumlah Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) (X4).

b. Variabel Terikat:

Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)

2. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, variabel yang diteliti hanya terbatas pada jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat upah minimum, dan jumlah ZIS, sehingga faktor-faktor lain seperti inflasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi tidak diikutsertakan dalam analisis. Kedua, penelitian ini hanya mencakup data pada periode 2021-2022, sehingga hasilnya mungkin tidak mencerminkan perubahan jangka panjang atau faktor lain yang terjadi sebelum atau setelah periode tersebut.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka mencakup seluruh angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, baik mereka yang baru pertama kali mencari pekerjaan maupun yang sebelumnya pernah bekerja namun kini tidak memiliki pekerjaan.¹⁸

b. Jumlah Penduduk

Penduduk didefinisikan sebagai orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang diperbolehkan secara hukum.¹⁹ Menurut Badan Pusat Statistik, Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih.²⁰ Dengan demikian, jumlah penduduk didefinisikan sebagai total banyaknya orang yang memenuhi kriteria tersebut.

c. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu

¹⁸ Didit Darmawan, *Pengantar Teori Ekonomi Makro Edisi Pertama*, (Surabaya : PT. Revka Petra Media, 2018), h. 73.

¹⁹ Zul Fadhi, et. al., *Ekonomi Kependudukan*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 93–94.

²⁰ Badan Pusat Statistik, *Metadata Sensus Penduduk 2020 (SP2020)*, diakses pada https://sensus.bps.go.id/metadata_statistik/index/sp2022?page=3&per-page=10 27 November 2024.

wilayah. IPM merupakan indikator yang mengukur kualitas hidup dengan memperhitungkan tiga dimensi dasar, yaitu: Umur panjang dan sehat, Pengetahuan, Kehidupan yang layak.²¹

d. Upah Minimum

Upah minimum didefinisikan sebagai jumlah terendah yang wajib diterima oleh seorang karyawan sebagai kompensasi atas pekerjaan atau layanan yang diberikan, dalam bentuk uang, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²²

e. Zakat Infak Sedekah (ZIS)

ZIS merupakan ajaran dalam Islam yang mengajarkan untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini, zakat, infak, dan sedekah adalah bagian dari ibadah, di mana zakat berfungsi sebagai instrumen dana sosial Islam yang sifatnya wajib, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela.²³

2. Definisi Operasional

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka dalam penelitian ini maksudnya ialah seluruh penduduk/masyarakat yang tercatat oleh BPS yang masuk dalam kategori penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun sedang mencari pekerjaan. Adapun satuan tingkat pengangguran

²¹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*, <https://bandungkab.bps.go.id/id/news/2024/09/11/107/indeks-pembangunan-manusia--ipm-.html> diakses pada tanggal 24 November 2024.

²² Harnida Gigih Aryanti, *Ketenagakerjaan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), h. 9.

²³ Tika Widiastuti, et. al, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAH (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, (Surabaya: Airlangga University Press), h. 14

terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2022 adalah persen.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dalam penelitian ini diartikan sebagai total individu yang tinggal secara tetap maupun sementara di suatu wilayah, yaitu kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2022, dengan ketentuan tertentu yang diterapkan. Data ini dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hitungan satuan ribu.

c. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian ini digunakan sebagai pengukuran untuk mengetahui bagaimana kualitas kesehatan, kualitas pendidikan dan kelayakan hidup masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2022. Data ini dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hitungan satuan persen.

d. Upah Minimum

Upah minimum dalam penelitian ini mengacu pada jumlah kompensasi terendah yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2022. Penetapan Upah Minimum dihitung dalam satuan rupiah.

e. Zakat Infak Sedekah (ZIS)

ZIS dalam penelitian ini diartikan sebagai total penyaluran dana sosial yang dihimpun dari zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di

kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2022. Total dana ZIS dalam penelitian ini dihitung dalam satuan rupiah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan. Sistematika ini terdiri atas tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian awal

Bagian awal mencakup berbagai halaman yang melengkapi penelitian ini. Halaman-halaman tersebut meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Bagian awal ini bertujuan untuk memberikan informasi pendahuluan dan pengantar bagi pembaca sebelum memasuki inti dari penelitian.

2. Bagian Utama

Bagian utama terdiri dari enam bab yang menjelaskan secara rinci berbagai aspek penelitian:

- a. Bab I adalah pendahuluan, yang memuat subbab mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan. Bab ini

berfungsi sebagai pengantar untuk memahami latar belakang dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

- b. Bab II membahas landasan teori yang berisi berbagai konsep dan teori yang relevan dari literatur yang mendukung penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat uraian mengenai penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian yang menjadi pijakan utama dalam menganalisis permasalahan.
- c. Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya dijelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi, teknik sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data. Penjelasan metodologi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah penelitian yang dilakukan.
- d. Bab IV memaparkan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data penelitian, pengujian hipotesis, dan temuan penelitian. Bagian ini memberikan informasi empiris yang dihasilkan dari proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
- e. Bab V berisi pembahasan yang mendalam mengenai hasil penelitian. Di dalamnya diuraikan analisis hasil penelitian dengan mengaitkan temuan penelitian terhadap teori yang relevan, serta menjelaskan implikasi dari hasil yang diperoleh.

- f. Bab VI merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak terkait. Kesimpulan ini dirumuskan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya, sementara saran disusun sebagai panduan untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari penelitian ini memuat beberapa lampiran penting sebagai pelengkap. Bagian ini mencakup daftar pustaka yang berisi sumber-sumber referensi yang digunakan, lampiran-lampiran sebagai data pendukung penelitian, serta daftar riwayat hidup peneliti yang memberikan informasi singkat mengenai latar belakang peneliti.